



Senin, 18 Oktober 2010 ✓

Laporan Keuangan KKR Tak Wajar

PONTIANAK. Opini tidak wajar diberikan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemkab Kubu Raya Tahun Anggaran 2009. Artinya, laporan keuangan secara umum belum disajikan secara wajar sesuai Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Inspektorat, BPKP dan DPRD Kubu Raya serta aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti, melakukan investigasi tegas dan akurat terhadap temuan BPK RI Perwakilan Kalbar. Namun, jangan sebaliknya menjadi cap stempel oknum-oknum Pemkab Kubu Raya,” tegas Ketua Persatuan Melayu Kalbar (Permak) Kecamatan Sungai Kakap, Bayu kepada Equator, Minggu (17/10).

Apalagi lanjutnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) itu masih menunjukkan kelemahan-kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Bahkan, terlihat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam LHP tersebut, beberapa permasalahan yang menjadi penyebab opini tidak wajar disebutkan, diantaranya biaya konsultasi sebesar Rp 3,7 miliar belum dikapitalisasikan dalam harga perolehan aset tetap. Terdapat ketidaktepatan penganggaran belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 11,3 miliar.

Kemudian, persediaan anggaran Pemkab Kubu Raya senilai Rp 1,8 miliar belum disajikan secara wajar. Penyajian aset tetap sebesar Rp 307,15 miliar tidak menggambarkan nilai wajar, terdapat penggunaan langsung terhadap pendapatan pajak penerangan jalan sebesar Rp 2.345.090.550 untuk talangan hutang rekening listrik penerangan jalan. Belum lagi, belanja modal gedung dan bangunan Dinas Pendidikan sebesar Rp 271.950.000 digunakan untuk rehab aset bukan milik Pemkab Kubu Raya. (jul)